BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori yang Terkait Variabel Penelitian

1. Legitimacy Theory

Teori legitimasi mengemukakan bahwa perusahaan bisa mempengaruhi serta dipengaruhi masyarakat pada tempat perusahaan tersebut melakukan aktivitas operasionalnya (Mahrani dan Soewarno, 2018). Untuk mendapatkan legitimasi, organisasi harus melangkah sesuai norma dan ketentuan masyarakat, serta organisasi perlu melakukan pengungkapan sukarela sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atau pemangku kepentingan. Masyarakat sudah memiliki kesadaran terhadap dampak lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan sehingga terdapat konsekuensi apabila manajemen gagal melegitimasi kegiataan yaitu intervensi dari pemerintah yang merupakan badan terpilih untuk memperhatikan masalah masyarakat (Wilmhurst dan Frost, 2000).

Legitimacy theory menyatakan bahwa perusahaan secara berkesinambungan harus memastikan apakah mereka telah beroperasi di dalam norma–norma yang dijunjung masyarakat dan memastikan bahwa aktivitas mereka bisa diterima pihak luar (dilegitimasi). Deegan (2002) menyatakan bahwa pengertian yang diberikan oleh teori legitimasi dibangun dari teori lain yaitu teori politik-ekonomi. Lindbolm (1994, hal 2) dalam Deegan (2002), mendefinisikan *legitimacy theory* sebagai sebuah kondisi atau status yang ada ketika sistem nilai entitas kongruen dengan sistem nilai masyarakat yang lebih luas dimana masyarakat menjadi bagiannya. Ketika suatu perbedaan, baik yang nyata atau potensial ada di antara kedua sistem nilai tersebut, maka akan muncul ancaman terhadap legitimasi perusahaan.

Postulat dari teori legitimasi adalah organisasi bukan hanya harus terlihat memperhatikan hak-hak investor namun secara umum juga harus memperhatikan hak-hak publik (Deegan dan Rankin, 1996). Berdasarkan definisi diatas maka tujuan, metode operasi, dan output organisasi harus sesuai dengan norma dan nilai sosial. Lebih utama, organisasi harus conform dengan aturan masyarakat untuk menjamin *social approval* dan dapat terus eksis. Sesuai dengan hal tersebut, sistem

akuntabilitas dan social accounting menjadi esensial untuk penerimaan operasi organisasi yang berkelanjutan (*continued approval of the organization"s operations*) oleh masyarakat.

Ghozali dan Chariri (2007) menyatakan bahwa hal yang mendasari teori legitimacy adalah "kontrak sosial" antara perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi. Shocker dan Sethi (1974) dalam Ghozali dan Chariri (2007) memberikan penjelasan tentang konsep kontrak sosial bahwa semua institusi sosial tidak terkecuali perusahaan beroperasi di masyarakat melalui kontrak sosial, baik eksplisit maupun impliit, dimana kelangsungan hidup dan pertumbuhannya didasarkan pada hasil akhir yang secara sosial dapat diberikan kepada masyarakat luas dan distribusi manfaat ekonomi, sosial atau politik kepada kelompok sesuai dengan power yang dimiliki.

Jadi pada dasarnya setiap perusahaan memiliki kontrak implisit dengan masyarakat untuk melakukan kegiatannya berdasarkan nilai–nilai yang dijunjung didalam masyarakat. Jika suatu perusahaan memenuhi kontrak implisit dengan stakeholder, stakeholder akan bertindak sebagaimana yang diinginkan perusahaan. Sebaliknya, ketika implisit kontrak dengan stakeholder tidak dipenuhi, maka terjadi kemungkinan kontrak yang implisit yang tentu saja akan berubah menjadi suatu hal yang eksplisit dan akan menimbulkan biaya yang lebih tinggi.

Biaya yang tinggi disebabkan masyarakat menolak melegitimasi keberadaan perusahaan di tengah-tengah mereka. Oleh karena itu, perusahaan berusaha mendapatkan legitimasi dari masyarakat dengan cara melaksanakan program program yang sesuai dengan harapan masyarakat. Implementasi riilnya adalah melalui pelaksanaan program *corporate social responsibility* dan mengungkapkannya baik di dalam *annual report* maupun sustainability report sebagai suatu bentuk informasi yang dibutuhkan investor untuk mengambil keputusan terkait kinerja perusahaan yang sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat.

Teori *legitimacy* menegaskan bahwa perusahaan terus berupayamemastikan bahwa mereka beroperasi dalam bingkai dan norma yang ada dalam masyarakat atau lingkungan diamana perusahaan berada, dimana mereka berusaha

untuk memastikan bahwa aktivitas mereka (perusahaan) diterima oleh pihak luar sebagai suatu yang "sah" (Deegan, 2004).

2. Agency Theory

Menurut Anthony dan Govindarajan (2005), teori agensi merupakan teori yang mendasari hubungan antara principal dan agent dengan asusmsi bahwa setiap individu termotivasi oleh kepentingannya masing-masing, sehingga dapat menimbulkan konflik antara principal dan agent. Teori ini menunjukan bahwa perusahaan juga memiliki tanggung jawab terhadap pihak yang berkepentingan. Teori ini menuntut perusahaan untuk memiliki manajemen yang efektif dan efisien, agar perusahaan dapat memberikan keuntungan bagi principal. Umumnya, tujuan agent dan principal memiliki tujuan yang sama, yaitu menghasilkan laba yang sebesar-besarnya agar mendapatkan keuntungan bersama dan mengembangkan nilai perusahaan di dalam masyarakat. Namun, ada beberapa agent yang menjalankan operasionalnya bukan untuk kepentingan bersama melainkan untuk kepentingan sendiri sehingga principal dapat rugikan jika memiliki agent yang kurang baik.

Dalam tata kelola terdapat struktur yang mendukung terjadinya tata kelola yang baik, salah satunya adalah dewan komisaris dan komite audit. Teori agensi ini juga dapat dianggap sebagai tanggungjawab agent terhadap principal, dimana agent adalah manajemen perusahaan dan principal sebagai pemegang saham. Oleh karena itu sebagai agent yang baik, maka dewan komisaris dan komite audit lebih giat dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Dalam menjalankan operasional, perusahaan akan memberikan tanggungjawab kepada pemegang saham dalam negara (lokal) maupun dari luar negara (asing). Perusahaan dalam memenuhi tanggungjawab kepada pemegang saham akan memberikan sebuah informasi yang cukup agar dapat digunakan sebagai penentu keputusan pemegang saham. Teori agensi akan terpenuhi ketika perusahaan dapat melaksanakan tata kelola nya dengan baik, perusahaan yang bertata kelola baik akan menghasilkan kinerja yang baik dan memberikan keuntungan bagi berbagai pihak.

3. Financial Performance

Kinerja keuangan perusahaan (*financial performance*) merupakan kondisi keuangan perusahaan dalam kurun waktu tertentu untuk mengukur keberhasilan

suatu perusahaan yang pada umumnya berfokus pada informasi kinerja yang berasal dari laporan keuangan.

Pengertian pengukuran kinerja keuangan menururt Mirza Rizkan (2017) secara sederhana adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar dan kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam hal penilaian kinerja tak lepas dari penilaian efektivitas dan efisiensi. Pengukuran kinerja bervariasi menurut tingkatan dalam organisasi. Pada tingkatan yang lebih rendah, pengukuran kinerja cenderung lebih terperinci, spesifik, kuantitatif dan perhatian ditunjukkan pada penyimpangan yang spesifik. Sedangkan pada tingkatan yang lebih tinggi, standarnya cenderung lebih umum, dan perhatian lebih ditunjukkan pada investasi untuk satu unit secara keseluruhan, hasil-hasil pokok dan penyimpangan yang bersifat pengecualian. Kinerja keuangan perusahaan (*corporate financial performance*) merupakan hasil yang dicapai oleh perusahaan atas berbagai aktivitas yang dilakukan dalam mengoptimalkan sumber keuangan yang tersedia. Kinerja keuangan dapat dilihat dari analisis laporan keuangan atau analisis rasio keuangan.

Kinerja keuangan perusahaan (*financial performance*) merupakan media pengukuran subjektif yang menggambarkan efektifitas penggunaan asset oleh sebuah perusahaan dalam menjalankan bisnis utamanya dan memperoleh peningkatan pendapatan (Setyowati, 2008). Adapun tujuan pokok penilaian kinerja adalah untuk memacu semangat karyawan dalam mencapai tujuan perusahaan dan dalam menerapkan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, agar melakukan tindakan dan hasil yang diinginkan. Data yang relevan dalam penilaian ini harus berada di dalam bidang pertanggungjawaban atau dapat dikendalikan oleh manajer yang bersangkutan. Manfaat informasi kinerja keuangan antara lain adalah:

a. Untuk mengetahui sejauh mana perkembangan perusahaan dalam setiap periodenya.
b. Untuk memprediksi kapasitas perusahaan dalam menghasilkan arus kas melalui sumber data yang ada.
c. Dapat digunakan untuk menilai kontribusi suatu bagian dalam mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan.

d. Bagi investor, informasi laporan kinerja perusahaan dapat menjadi bahan pertimbangan apakah dapat tetap mempertahankan investasinya atau tidak.
e. Bagi calon investor, informasi laporan kinerja keuangan dapat menajadi bahan pertimbangan untuk melakukan investasi diperusahaan tersebut atau tidak.

Kinerja perusahaan dapat diukur dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangan yang dikeluarkan secara periodik. Laporan keuangan berupa laporan neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan modal, serta laporan catatan atas laporan keuangan yang pada dasarnya secara bersama-sama memberikan suatu gambaran tentang posisi keuangan perusahaan. Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan digunakan investor untuk memperoleh perkiraan tentang laba dan deviden dimasa mendatang dan resiko atas penilaian tersebut. Dengan demikian pengukuran kinerja keuangan dari laporan keuangan dapat digunakan sebagai alat ukur pertumbuhan kekayaan pemegang saham (investor).

Natali Yustisia (2017) dalam tulisannya menjelaskan ada lima macam alat analisis laporan keuangan, yaitu analisis laporan keuangan komparatif, analisis laporan keuangan common-size, analisis rasio, analisis arus kas, dan model penilaian. Analisis laporan keuangan komparatif (*comparative financial statement analysis*) dilakukan dengan cara manelaah laporan neraca, laporan laba-rugi, atau laporan arus kas yang berurutan dari satu periode ke periode berikutnya. Analisis ini meliputi penelaahan perubahan saldo tiap-tiap akun dari tahun ke tahun atau selama beberapa tahun.

Analisis laporan keuangan *common-size* disusun dengan cara menghitung tiap-tiap rekening dalam laporan rugi-laba dan neraca menjadi proporsi total penjualan (untuk laporan rugi-laba) atau dari total aktiva (untuk neraca). Jadi total penjualan (untuk laporan laba-rugi) atau total aktiva (untuk neraca) dinyatakan dengan 100%, kemudian rekening yang lainnya dinyatakan sebagai persentase terhadap total penjualan (untuk laporan laba-rugi) atau total aktiva (untuk neraca).

Analisis Rasio (*ratio analysis*) pada dasarnya disusun dengan menggabungkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan. Apabila rasio

keuangan tersebut diiterpretasikan secara tepat, maka akan menunjukkan suatu evaluasi.

Analisi arus kas (*cash flow analysis*) digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi sumber dan penggunaan dana. Analisis ini menyediakan pandangan tentang bagaimana perusahaan memperoleh pendanaannya dan menggunakan sumber dayanya. Analisis ini bertujuan untuk menaksir kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas.

Alat analisis selanjutnya adalah penilaian (*valuation*), analisis ini mengacu pada estimasi nilai intrinsik sebuah perusahaan atau sahamnya. Dasar penilaian menggunakan teori nilai sekarang (*present value theory*). Teori nilai sekarang menggunakan konsep nilai waktu dari uang (*time value of money*), yang secara sederhana menyatakan bahwa sebuah entitas lebih menyukai konsumsi saat ini dari pada konsumsi di masa depan.

Dari kelima macam alat analisis tersebut, penelitian ini hanya menggunakan analisis rasio sebagai alat analisis laporan keuangan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. Analisis rasio keuangan memiliki sifat menyeluruh karena menggunakan hampir seuruh elemen yang terdapat dalam laporan keuangan, jadi ketika rasio tersebut diinterpretasikan dengan tepat akan mampu menjelaskan kondisi perusahaan baik secara finansial maupun nonfinansial.

Analisis Rasio (*ratio analysis*) merupakan alat analisis laporan keuangan yang popular digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan. Rasio keuangan pada dasarnya disusun dengan menggabungkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan. Apabila rasio keuangan tersebut diiterpretasikan secara tepat, maka akan menunjukkan suatu evaluasi.

Berdasarkan tujuan penganalisa angka, rasio dapat digolongkan menjadi :

a. Rasio likuiditas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas terdiri dari: *Current Ratio, Quick Ratio, dan Net Working Capital.*

b. Rasio aktivitas adalah rasio yang mengukur sejauh mana efektivitas penggunaan aset perusahaan pada tingkat aktivitas tertentu. Rasio Aktivitas terdiri dari: *Total Asset Turnover, Fixed Asset Turnover, Account*

Receivable Turnover, Inventory Turnover, Average Collection Period, dan Day's Sales in Inventory.

c. Rasio solvabilitas adalah rasio yang mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio solvabilitas terdiri dari: *Debt Ratio, debt to Equity Ratio, Long Term Debt to equity Ratio, long Term Debt to Capitalization Ratio, Times Interest Earned, Cash Flow Interest Coverage, Cash Flow Interest Coverage, Cash Flow to Net Income, dan Cash Return on Sales.*

d. Rasio profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio profitabilitas terdiri dari: *Gross Profit Margin, Net Profit Margin, Return on Assets, Return on Equity, dan Operating Ratio.*

e. Rasio profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio profitabilitas terdiri dari: *Gross Profit Margin, Net Profit Margin, Return on Assets, Return on Equity, dan Operating Ratio.*

Dari kelima macam rasio tersebut, penelitian ini hanya menggunakan satu macam rasio yaitu rasio profitabilitas dengan *Return on Asset* (ROA). Rasio ini dianggap begitu penting karena mengingat bahwa rasio tersebut dihitung menggunakan komponen laba perusahaan, yang mana laba adalah tujuan utama semua perusahaan.

a. Return on Asset (ROA)

Seperti yang sudah diketahui bahwa *Return on Asset* (ROA) adalah salah satu dari rasio profitabilitasyang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dari aktiva yang digunakan. Kinerja ROA dalam menilai kemampuan perusahaan adalah berdasarkan penghasilan laba di periode sebelumnya agar bisa di manfaatkan di periode selanjutnya.

Perhitungan ROA sering digunakan oleh pihak manajemen puncak untuk mengevaluasi berbagai unit bisnis dalam suatu perusahaan multinasional dan yang terpenting adalah dengan diketahuinya ROA maka perusahaan dapat mengukur seberapa baik perusahaan dalam menggunakan dana yang ada sehingga menciptkana laba.

Adapun dalam menghitung Return on Asset ini dibutuhkan laba bersih dan totak aktiva yang dimiliki perusahaan sebagai bahan perbandingan. Adapun formulanya adalah :

$$ROA = \frac{\text{Earning After Tax}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Semakin tinggi hasil yang diperoleh dari perhitungan ROA, maka akan semakin baik perusahaan tersebut karena tingkat pengembaliannya semakin besar. Adapun menurut Munawir (2002) manfaat dari digunakannya ROA adalah :

a. Jika perusahaan telah menjalankan praktik akuntansi dengan baik maka dengan analisis ROA dapat diukur efisiensi penggunaan modal yang menyeluruh, baik yang terkait dengan kegiatan produksi maupun penjualan yang dilakukan perusahaan.
b. Dapat diperbandingkan dengan rasio industri sehingga dapat diketahui posisi perusahaa terhadap industri. Hal ini merupakan satu langkah dalam perencanaan strategi.
c. Analisa ROA bisa dimanfaatkan untuk menilai efisiensi berbagai kegiatan yang dilakukan oleh divisi lain dengan mengalokasikan seluruh biaya dan modal dengan modal terkait.

b. **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan**

Hastuti (2005) dalam Pujiasih (2013) menyatakan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan antara lain:

a. Terkonsentrasi atau tidaknya kepemilikan : Kepemilikan yang banyak terkonsentrasi oleh institusi akan memudahkan pengendalian sehingga akan meningkatkan kinerja keuangan.
b. Manipulasi laba : Manipulasi laba merupakan upaya manajemen untuk mengubah laporan keuangan yang bertujuan menyesatkan pemegang saham atau investor yang ingin mengetahui dengan benar bagaimana kinerja perusahaan.
c. Pengungkapan laporan keuangan : Pelaporan keuangan perusahaan *(disclosure)* sebagai salah salah satu aspek dari transparansi laporan keuangan yang dapat menjadi dasar dalam menilai baik buruknya kinerja perusahaan oleh stakeholder apakah sesuai dengan kebijakan pemerintah

dan norma-norma dari masyarakat sehingga akan menjadi dasar yang dapat dipercaya.

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan sebuah perusahaan. Namun, kali ini yang sangat mempengaruhi pandangan seluruh pihak sehingga berimbas pada kinerja keuangan adalah *environmental performance*, *environmental disclosure*, dan *environmental cost* yang dialokasikan perusahaan dalam kepeduliannya terhadap kerusakan yang diakibatkan oleh aktivitas operasional perusahaan.

4. Environmental Performance

Menurut Sambharakrehsna (2009) di dalam Widodo (2017) *environmental performance* merupakan suatu hasil yang terukur dari sistem pengelolaan lingkungan. Prayanthi dan Mandagi (2015) mengemukakan bahwa manajemen lingkungan merupakan suatu strategi perusahaan yang akan menggambarkan kinerja lingkungan berdasarkan suatu standar evaluasi tertentu. Lebih lanjut, dikatakan bahwa strategi pengelolaan lingkungan akan menghasilkan *enviromental performance* yang baik dan akan berdampak pada peningkatan *financial performance* (Klassen dan McLauglin, 1996).

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menerapkan PROPER untuk meningkatkan keikutsertaan perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan. PROPER atau singkatan dari Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan merupakan salah satu upaya Kementrian Negara Lingkungan Hidup untuk mendorong penataan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui instrument informasi. PROPER didesain menggunakan instrumen insentif dan disinsentif. Instrumen insentif berupa penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk perusahaan yang berkinerja baik atas pengelolaan lingkungan. Kinerja tersebut ditandai menggunakan label biru, hijau dan emas. Adapun sebaliknya (diinsentif), penyampaikan informasi dengan label merah dan hitam menandakan kinerja pengelolaan lingkungan tidak baik (menlhk.go.id, 2019).

Table 2.1

Indikator Warna	Skor
Emas	5
Hijau	4
Biru	3
Merah	2
Hitam	1

Penetapan peringkat kinerja PROPER didasari pada beberapa aspek penilaian, yaitu meliputi :

a. Emas, diberikan kepada penanggung jawab usaha yang secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan (*environmental excellency*) dalam proses produksi atau jasa, melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat.

b. Hijau, diberikan kepada penanggung jawab usaha yang melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (*beyond compliance*) melalui pelaksanaan pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumber daya secara efisien melalui upaya 4R (*Reduce, Reuse, Recycle dan Recovery*), dan melakukan upaya tanggung jawab sosial *(Corporate Social Responsibility)* dengan baik.

c. Biru, diberikan kepada penanggung jawab usaha yang melakukan upaya pengelolaan lingkungan sebagaimana yang telah dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundangundangan.

d. Merah, diberikan kepada penanggung jawab usaha yang melakukan pengelolaan lingkungan hidup tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

e. Hitam, diberikan kepada penanggung jawab usaha yang sengaja melakukan perbuatan atau kelalaian yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan serta pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan atau tidak melaksanakan sanksi administrasi.

5. Environmental Disclosure

Desy (2018) menjelaskan bahwa *environmental disclosure* merupakan pengungkapan informasi terkait tanggung jawab terhadap lingkungan dalam

instrumen laporan keuangan. Menurut Effendi, Rochman, Yosefa Sayekti (2012), *environmental disclosure* di proksikan dengan mengggunakan skor pengungkapan *environmental disclosure* pada annual report perusahaan sampel, Bobot skor yang digunakan adalah menggunakan Indonesia *Environmental Reporting Index* (IER) hasilnya akan lebih akurat dan tepat untuk digunakan di indonesia. *Environmental disclosure* penting dilakukan karena melalui pengungkapan lingkungan hidup pada laporan tahunan perusahaan, masyarakat dapat mengetahui dan memantau aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memenuhi tanggung jawab sosialnya.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.29/POJK.04/2016 Pasal 4 menyebutkan bahwa dalam laporan tahunan perusahaan wajib menguraikan terkait seluruh aktivitas yang telah dilakukan perusahaan mengenai tanggungjawab lingkungan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Namun peraturan tersebut tidak terdapat persyaratan format dan isi dalam laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada standar resmi dalam pelaporan lingkungan tersebut sehingga pengungkapan informasi lingkungan suatu perusahaan bersifat sukarela (*voluntary*).

Menurut Chariri dan Ghozali (2007) pengungkapan dibagi menjadi dua jenis yaitu, *voluntary disclosure* dan *mandatory disclosure*. *Voluntary disclosure* adalah pengungkapan berbagai informasi yang berkaitan dengan operasi yang dilakukan perusahaan secara sukarela. Meski pada kenyataannya pengungkapan secara sukarela tidak benar-benar terjadi karena terdapat kecenderungan bagi perusahaan untuk menyimpan dengan sengaja informasi yang sifatnya dapat menurunkan arus kas. Hal tersebut dianggap dapat menyebabkan kerugian pada perusahaan. Oleh karena itu, manajer suatu perusahaan hanya akan mengungkapkan informasi yang baik dan dapat menguntungkan perusahaan.

Berbeda dengan *mandatory disclosure*. *Mandatory disclosure* adalah pengungkapan informasi berkaitan dengan operasi perusahaan yang bersifat wajib dan dinyatakan dalam peraturan hukum. Perbedaannya dengan pelaporan yang bersifat *voluntary*, pelaporan jenis *mandatory* akan mendapat sorotan dan kontrol dari lembaga yang berwenang. Terdapat standar yang menjamin kesamaan bentuk secara relatif dalam praktek pelaporan dan juga terdapat persayaratan minimum

yang harus dipenuhi. *Mandatory disclosure* juga dapat menjadi jembatan atas asimetri informasi antara investor dengan manajer perusahaan atas kebutuhan informasi.

Perusahaan dalam menerapkan dan melaksanakan *Environmentaldisclosure* memperoleh banyak manfaat, diantaranya mempertahankan dan mendorong reputasi serta citra merek perusahaan, mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial, mereduksi risiko bisnis perusahaan, melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha, membuka peluang pasar yang lebih luas, memperbaiki hubungan dengan stakeholders, memperbaiki hubungan dengan regulator, meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan, dan adanya peluang untuk memperoleh penghargaan menurut (Desy, 2018).

Environmental disclosure merupakan pengungkapan informasi yang berkaitan dengan lingkungan di dalam laporan tahunan perusahaan *(annual report).* Pada umumnya terdapat pada bagian terpisah pada *Sustainability Report* atau tercantum dalam *Annual Report* dan di Indonesia yang memiliki otoritas pengungkapan mandatory (wajib) adalah Otoritas Jasa Keunagn (OJK).

Environmental disclosure dalam penelitian ini diukur dengan rasio proporsi pengungkapan, pengukuran yang mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh . Mirza Rizkan, Islahuddin, Nadirsyah (2017). Penggunaan rasio proporsi pengungkapan sebagai indikator environmental disclosure dikarenakan adanya ketidaksamaan jumlah item yang wajib diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan perusahaan pertambangan. Maka sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dalam GRI-G4 kategori lingkungan, rumus yang digunakan dalam menghitung *environmental disclosure* adalah :

$$\text{Environmental Disclosure} = \frac{\text{Total items } \textit{disclosed}}{34 \text{ items}}$$

Ada 34 items yang dimaksud menurut The Boston-based Coalition on Environmentally Responsible Economic (CERES)adalah :

Tabel 2.2

Indikator Pengungkapan GRI-G4 Kategori Lingkungan

Indikator		Keterangan
Bahan	G4-EN 1	Bahan yang digunakan berdasarkan volume
	G4-EN 2	Presentase bahan yang digunakan merupakan bahan daur ulang
Energi	G4-EN 3	Konsumsi energi dalam organisasi
	G4-EN 4	Konsumsi energi diluar organisasi
	G4-EN 5	Intensitas energi
	G4-EN 6	Pengurangan konsumsi energi
	G4-EN 7	Pengurangan kebutuhan pada produk dan jasa
Air	G4-EN 8	Total pengambilan air berdasarkan sumber
	G4-EN 9	Sumber air yang secara signifikan dipengaruhi pengambilan air
	G4-EN 10	Presentase dan total volume air yang didaur ulang dan digunakan kembali
Keaneka Ragaman Hayati	G4-EN 11	Lokasi-lokasi operasional yang dimiliki, disewa, dikelola di dalam, atau yang berdekatan dengan, kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung
	G4-EN 12	Uraian dampak signifikan kegiatan, produk, dan jasa terhadap keanekagaraman hayati di kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekagaraman hayati tinggi di luar kawasan lindung
	G4-EN 13	Habitat yang dilindungi dan dipulihkan
	G4-EN 14	Jumlah total spesies dalam IUNC Red List dan spesies dalam daftar spesies yang dilindungi nasional dengan habitat di tempat yang dipengaruhi operasional, berdasarkan tingkat risiko kepunahan
Emisi	G4-EN 15	Emisi gas rumah kaca energi langsung
	G4-EN 16	Emisi gas rumah kaca energi tidak langsung
	G4-EN 17	Emisi gas rumah kaca energi tidak langsung lainnya
	G4-EN 18	Intensitas emisi gas rumah kaca
	G4-EN 19	Pengurangan emisi gas rumah kaca
	G4-EN 20	Emisi bahan perusak ozon
	G4-EN 21	NOX, SOX, dan emisi udara signifikan lainnya
Efluen dan Limbah	G4-EN 22	Total air yang dibuang berdasarkan kualitas dan tujuan
	G4-EN 23	Bobot total limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan
	G4-EN 24	Jumlah dan volume total tumpahan signifikan

	G4-EN 25	Bobot limbah yang dianggap berbahaya menurut ketentuan konvensi basel lampiran I, II, III, dan VIII yang diangkut, diimpor, diekspor, atau diolah, dan presentaselimbah yang diangkut untuk pengiriman internasional
Produk dan Jasa	G4-EN 26	Identitas, ukuran, status lindung, dan nilai keanekaragaman hayati dari badan air dan habitat terkait yang secara signifikan terkena dampak dari air buangan dan limpasan dari organisasi
	G4-EN 27	Tingkat mitigasi dampak terhadap dampak lingkungan `
	G4-EN 28	Presentase produk yang terjual dan kemasannya yang direklamasi menurut kategori
Kepatuhan	G4-EN 29	Nilai moneter denda signifikan dan jumlah total sanksi nonmoneter karena ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturanlingkungan
Transportasi	G4-EN 30	Dampak lingkungan signifikan pengangkutan produk dan barang lain serta bahan untuk operasional organisasi, dan pengangkutan tenaga kerja
Lain-lain	G4-EN 31	Total pengeluaran dan investasi perlindungan lingkungan berdasarkan jenis
Pemasok atas Lingkungan	G4-EN 32	Presentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria lingkungan
	G4-EN 33	Dampak lingkungan negatif signifikan aktual dan potensial dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
Mekanisme Pengaduan Masalah Lingkungan	G4-EN 34	Jumlah pengaduan tentang dampak lingkungan yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi

6. Komite Audit

Komite Audit adalah suatu komite yang dibentuk dan memiliki tanggungjawab kepada dewan komisaris dimana anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris (Widjaja & Maghviroh, 2011). Komite Audit sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang yang berasal dari luar perusahaan dan seorang Komisaris Independen yang sekaligus merangkap sebagai ketua Komite Audit.

Menurut Hanifah (2006) membangun peran Komite Audit yang efektif tidak dapat terlepas dari kacamata penerapan prisip-prinsip GCG secara keseluruhan di suatu perusahaan, dimana independensi, transparansi, akuntanbilitas dan

tanggungjawab, serta sikap adil menjadi prinsip dan landasan organisasi perusahaan, hal tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Komite Audit harus independen, dimulai dengan dipersyaratkannya Komisaris Independen sebagai ketua Komite Audit. Di samping itu anggotan Komite Audit lainnya juga harus benar-benar independen terhadap perusahaan. Nama anggota Komite Audit harus diumumkan ke public luas sehingga terjadi kontrol sosial mengenai independennya.

2. Komite Audit harus transparan, dimulai dengan keharusan adanya agenda program kerja tahunan tertulis dari Komite Audit yang kemudian didukung dengan keteraturan rapat Komite Audit yang menghasilkan risalah rapat tertulis.

3. Komite Audit harus memiliki akuntabilitas tinggi, dimulai dengan pemenuhan persyaratan generic dari anggota Komite Audit, yang secara team setidaknya memiliki kompetensi dan pengalaman sangat cukup di bidang berikut:

   a. Audit, akuntansi dan keuangan: pemahaman mendalam konsep dan praktek mengenai financial engineering, corporate finance, internal control, risk management dan auditing serta fraud examination.

   b. Peraturan dan perundangan: pemahaman mendalam konsep dan praktek peraturan dan perundangan (termasuk tetapi tidak terbatas) mengenai Pasar Modal, Pasar Uang, Pasar Komoditi Berjangka, Bursa Saham, Undang-Undang PT, BUMN/BUMD dan GCG.

   c. Proses bisnis industri terkait: pemahaman konsep dan praktek bisnis industri terkait, misal Industri Perbankan, Industri Tambang dan Industri Produk Konsumen. Untuk lebih efektif, Komite Audit harus memperoleh masukan dari sub komite lainnya terutama komite risk management mengenai identifikasi dan penanganan resiko penting perusahaan. Disamping itu, Komite Audit juga harus komunikatif terutama dengan auditor eksternal dan internal audit, sehingga mereka memiliki jalur cepat dalam mengkomunikasikan hal-hal yang signifikan yang perlu diketahui oleh Komite Audit, terutama dalam hal-hal terjadinya penyimpangan yang kritis di perusahaan.

4. Komite Audit harus bersikap adil, dalam pengambilan keputusan Komite Audit harus benar-benar melandaskannya pada sikap adil kepada semua pihak, terutama dalam hal penelaahan terhadap kesalahan asumsi maupun pelanggaran terhadap resolusi Dewan Direksi. Oleh karenanya, semua keputusan harus didasarkan pada fakta dan dokumen penunjang cukup. Jika diperlukan, Komite Audit dapat meminta bantuan pihak luar untuk mengadakan penyidikan hal-hal tertentu.
5. Komite Audit harus memiliki audit *committee charter* (*term of reference*) sebagai rujukan internal tentang bagaimana sebaiknya mengatur diri sendiri sehingga tujuan terbentuknya Komite Audit di perusahaan tercapai. Audit *committee charter (term of reference)* mendefinisikan secara jelas peran dan tanggung jawab Komite Audit serta kerangka kerja fungsionalnya.

Lebih jelasnya lagi Hanifah (2006) dalam jurnal bisnis dan ipteknya memaparkan peran dan tanggungjawab Komite Audit yang dengan jelas harus tercantum pada audit committee charter (term of reference) yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaporan Laporan Keuangan (*Financial Reporting*) : Dalam pelaporan keuangan, peranan dan tanggungjawab Komite Audit adalah:
   a. Melakukan pengawasan proses pembuatan laporan keuangan, dengan penekanan pada kepatuhan terhadap standar dan policy akuntansi yang berlaku.
   b. Melakukan review atas laporan-laporan keuangan terhadap standar dan policy akuntansi yang berlaku dan konsisten terhadap informasi yang diketahui oleh anggota Komite Audit.
   c. Melakukan pengawasan audit eksternal dan melakukan assesment mengenai kualitas jasa audit yang dilakukan, dan mengenai kepantasan fees yang dibebankan oleh auditor eksternal.
2. Manajemen Resiko dan Kontrol Risk (*Risk and Control Management*) : Dalam hal manajemen resiko dan kontrol, peran dan tanggungjawab Komite Audit adalah:

a. Melakukan pengawasan proses manajemen resiko dan pengendalian, termasuk pengidentifikasian dari resiko-resiko dan evaluasi dari pengendalian yang dapat memperkecil baik kemungkinan terjadinya maupun dampak dari resiko-resiko tersebut.
b. Melakukan pengawasan terhadap cakupan audit internal dan audit eksternal dalam rangka memastikan bahwa semua resiko utama dan bentuk pengendaliannya telah dipertimbangkan oleh para auditor.
c. Meyakini bahwa manajemen telah melaksanakan pengendalian resiko-resiko sesuai dengan rekomendasi dari para auditor, internal dan eksternal.

3. *Corporate Governance* : Dalam rangka mewujudkan GCG, Komite Audit bertanggungjawab memberikan kepastian bahwa perusahaan telah melaksanakan secara layak seluruh Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan urusannya dengan pantas dan mempertahankan kontrol yang efektif terhadap benturan kepentingan dan manipulasi terhadap pegawainya.

Dan Hanifah (2006) menjelaskan peran dan tanggungjawab Komite Audit adalah:

a. Pengawasan terhadap proses penerapan GCG.
b. Memastikan bahwa manajemen puncak secara aktif mensosialisasikan budaya corporate governance.
c. Memonitor bahwa code of conduct telah dilaksanakan secara konsekuen.
d. Memahami semua pokok persoalan maupun issues yang mungkin dapat mempengaruhi kinerja financial maupun non finansial dari perusahaan.
e. Memantau bahwa perusahaan mematuhi Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.
f. Mewajibkan auditor internal melaporkan secara tertulis setiap enam bulan sekali mengenai hasil evaluasi pelaksanaan corporate governance di perusahaan dan memberikan laporan bila terdapat penyimpangan yang serius.

Adapun persyaratan keanggotaan Komite Audit sesuai Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-41/PM/2003 tanggal 22 Desember 2003 tentang Peraturan

Nomor IX.1.5: Pembentukkan dan Pedoman Pelaksanaan Keja Komite Auditadalah sebagai berikut (Hanifah, 2006):

a. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
b. Salah seorang dari anggota Komite Audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan.
c. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
d. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
e. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa audit dan atau non audit pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris.
f. Bukan merupakan Karyawan Kunci Emiten atau Perusahaan Publik dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris.
g. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain.
h. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau Perusahaan Publik, Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik.

B. Variabel dan Keterkaitan antar Variabel Penelitian

1. Hubungan *Environmental Performance* dan Kaitannya dengan *Financial Performance*

Secara teoritis, adanya kinerja lingkungan (*environmental performance*) yang positif dari perusahaan dapat memberikan pengaruh yang positif pula terhadap perusahaan, terutama hal tersebut dapat dilihat dari kenaikan laba dan/atau kas. Dengan memberikan kesadaran dan peluang yang lebih besar kepada perusahaan bahwa pentingnya melakukan praktik kinerja lingkungan maka tentu tujuan

perusahaan dapat didapatkan dengan mudah. Namun hal tersebut tentunya harus sejalan dengan praktik yang perusahaan tersebut jalankan, apakah memang sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan atau tidak.

Perusahaan dinilai berdasarkan dengan aturan yang telah di buat oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang lebih dikenal dengan PROPER atau singkatan dari Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan. Ada lima tingkatan penilaian dari yang tertinggi sampai terendah yaitu emas, hijau, biru, merah, dan hitam. Dimana kelima penilaian tersebut tentu sangat menggambarkan praktik perusahaan dalam menjalankan kinerja lingkungan.

Semakin baik dan aktif sebuah perusahaan menjalankan kinerja perusahaannya maka semakin positif pengaruh yang diberikan terhadap kinerja keuangan (*financial performance*) yang dimiliki perusahaan tersebut, hal tersebut salah satunya dapat ditandai dengan kenaikan laba atau kas dalam periode tertentu.

2. Hubungan *Environmental Disclosure* dan Kaitannya dengan *Financial Performance*

Dalam menjalankan pengungkapan lingkungan (*environmental disclosure*), perusahaan menjalankan dengan berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Seperti yang telah dijelaskan bahwa dalam pengungkapan lingkungan dibagi menjadi dua macam yaitu *voluntary disclosure* (pengungkapan sukarela) dan *mandatory disclosure* (pengungkapan wajib). Maka berdasarkan hal tersebut tentunya tidak semua perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukanpengungkapan lingkungan. Namun pengungkapan lingkungan bukan berarti tidak penting untuk dilakukan bagi perusahaan yang tidak memiliki kewajiban. Banyak pengaruh yang dapat diberikan pengungkapan lingkungan terhadap sebuah perusahaan, semakin positif maka pengaruh yang diberikan kepada perusahaan tentu akan semakin positif pula. Tentunya dalam hal kinerja keuangannya.

Hal-hal ini disebabkan karena pengungkapan lingkungan memiliki posisi yang penting sendiri di masyarakat. Masyaakat yang peduli terhadap lingkungan tentunya akan memperhatikan citra sebuah perusahaan sebelum memakai produk atau jasa perusahaan tersebut. Dan sangat jelas, di era perkembangan teknologi

yang canggih tentunya hal tersebut sangat disorot dan diperhatikan oleh masyarakat.

Citra perusahaan berbanding lurus dengan pengungkapan serta praktik yang dijalankan perusahaan tersebut di lingkungan sekitar. Dan citra perusahaan beroengaruh positif terhadap kinerja keungan perusahaan.

3. **Variabel komite audit sebagai variabel moderasi antara *environmental performance* terhadap *financial performance***

Komite audit memiliki peran yang sangat penting penting dalam sebuah perusahaan, ada tiga aspek yang menajdi peran dan tanggung jawab komite audit yaitu terhadap Financial Reporting, terhadap Risk and Control Management, dan terhadap Corporate Governance. Adapun keterkaitannya terhadap environmental performance adalah dimana komite audit memiliki peran terhadap GCG yaitu Komite Audit bertanggung jawab untuk memberikan kepastian bahwa perusahaan telah melaksanakan secara layak seluruh undang-undang dan peraturan yang berlaku (Christine Natalie : 2020). Dalam hal ini, Komite Audit tidak memiliki tanggung jawab langsung terhadap kinerja lingkungan perusahaan, namun komite audit memiliki tanggung jawab terhadap pembuatan laporan terkait kinerja lingkungan yang dilakukan perusahaan atau yang dikenal sebagai environmental disclosure.

Dan dalam hal ini jelas keterkaitannya antara Komite Audit terhadap financial performance adalah terletak pada peran Komite Audit terhadap financial reporting. Dimana *financial performance* suatu perusahaan dapat dinilai dari financial reorting yang dimiliki oleh perusahaan tersebut.

Dari beberapa hal dijabarkan dapat diketahui bahwa memang adanya keterkaitan antara Komite Audit terhadap environmental performance dan financial performance.

4. **Variabel komite audit sebagai variabel moderasi antara *environmental disclosure* terhadap *financial performance***

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ketarkaitan antara Komite Audit dan *environmental disclosure* dibangun karna adanya peran Komite Audit terhadap GCG suatu perusahaan. Dimana dalam hal tersebut dijelaskan bahwa Komite Audit

bertanggung jawab untuk memberikan kepastian bahwa perusahaan telah melaksanakan secara layak seluruh undang-undang dan peraturan yang berlaku (Christine Natalie : 2020). *Environmental disclosure* sendiri diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.29/POJK.04/2016 Pasal 4 menyebutkan bahwa dalam laporan tahunan perusahaan wajib menguraikan terkait seluruh aktivitas yang telah dilakukan perusahaan mengenai tanggungjawab lingkungan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Maka dapat disimpulkan adanya keterkaitan anatar komite audit terhadap *environmental disclore* dan *financial performance.*

C. Studi Terdahulu yang Terkait dengan Penelitian

Penelitian tentang kinerja auditor bukan hal baru, telah dilakukan penelitian sejenis baik berbentuk skripsi maupun laporan penelitian yang lainnya. Untuk itu dalam penelitian dengan judul **"*ENVIRONMENTAL PERFORMANCE* DAN *ENVIRONEMNTAL DISCLOSURE* SERTA PENGARUHNYA TERHADAP *FINANCIAL PERFORMANCE DENGAN KOMITE AUDIT SEBAGAI VARIABEL MODERASI* (Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Pertambangan Periode 2016 – 2020)"**

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Mirza Rizkan, Islahuddin, Nadirsyah	PENGARUH *ENVIRONMENTAL PERFORMANCE* DAN *ENVIRONMENTAL DISCLOSURE* TERHADAP *FINANCIAL PERFORMANCE* PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DAN PEMEGANG HPH/HPHTI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA	Variabel independen : *Environmental Performance Environmental Discosure* Variabel dependen : 1.*Financial Performance*	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja lingkungan dan pengungkapan lingkungan perusahaan periode 2010 hingga 2013 berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan di tahun berikutnya, yaitu periode 2011 hingga 2014. Kinerja lingkungan dan pengungkapan lingkungan perusahaan berpengaruh baik secara simultan maupun secara parsial.

2	Rizki Aulia dan Sofyan Hadinata	PENGARUH *ENVIRONMENTAL PERFORMANCE*, *ENVIRONMENTAL DISCLOSURE*, DAN ISO 14001 TERHADAP *FINANCIAL PERFORMANCE*	Variabel independen : *Environmental Performance* *Environmental Discosure* 3. ISO 14001 Variabel dependen : 1. *Financial Performance*	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara statistik *enviromental performance* dan *enviromental disclosure* berpengaruh positif terhadap *financial performance*, sedangkan ISO 14001 tidak berpengaruh terhadap *financial performance*.
3	Lastri Meito Nababan dan Dede Abdul Hasyir	PENGARUH *ENVIRONMENTAL COST* DAN *ENVIRONMENTAL PERFORMANCE* TERHADAP *FINANCIAL PERFORMANCE* (Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Pertambangan Peserta PROPER Periode 2012 – 2016)	Variabel independen : *EnvironmentalCost* *Environmental Performance* Variabel dependen : 1. *Financial Performance*	Hasil dari penelitian ini ecara simultan *environmental cost perusahaan, environmental performance* (PROPER) dan *firm size* memiliki pengaruh yang signifikan terhadapfinancial performance(ROA) pada sampel perusahaan pertambangan yang konsiten menjadi peserta PROPER yang diselenggarakan oleh KHLK tahun 2012-2016 dengan kontribusi pengaruh yang diberikan adalah sebesar 41,3%, sedangkan sebanyak 58,7% sisanya merupakan besarnya kontribusi pengaruh yang diberikan oleh faktor lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini
4	Eny Maryanti dan Wildah Nihayatul Fithri	*Corporate Social Responsibilty, Good Corporate Governance*, Kinerja Lingkungan Terhadap Kinerja Keuangan Dan Pengaruhnya Pada Nilai Perusahaan	Variabel independen : *Corporate Social Responsibility* *Good Corporate Governance* 3. Kinerja Lingkungan Variabel dependen : 1. Kinerja Keuangan 2. Nilai Perusahaan	Hasil penelitian menunjukan bahwa kinerja lingkungan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Kepemilikan manajerial, dewan komisaris dan komisaris independen secara tidak langsung melalui kinerja keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai

				perusahaan. Kepemilikan institusi dan komite audit secara tidak langsung melalui kinerja keuangan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan.

D. Kerangka Analisis

Bagan kerangka analisis bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan pengaruh hubungan antara beberapa variable yang diteliti. Skema kerangka analisis pada penetilian ini dijabarkan sebagai berikut :

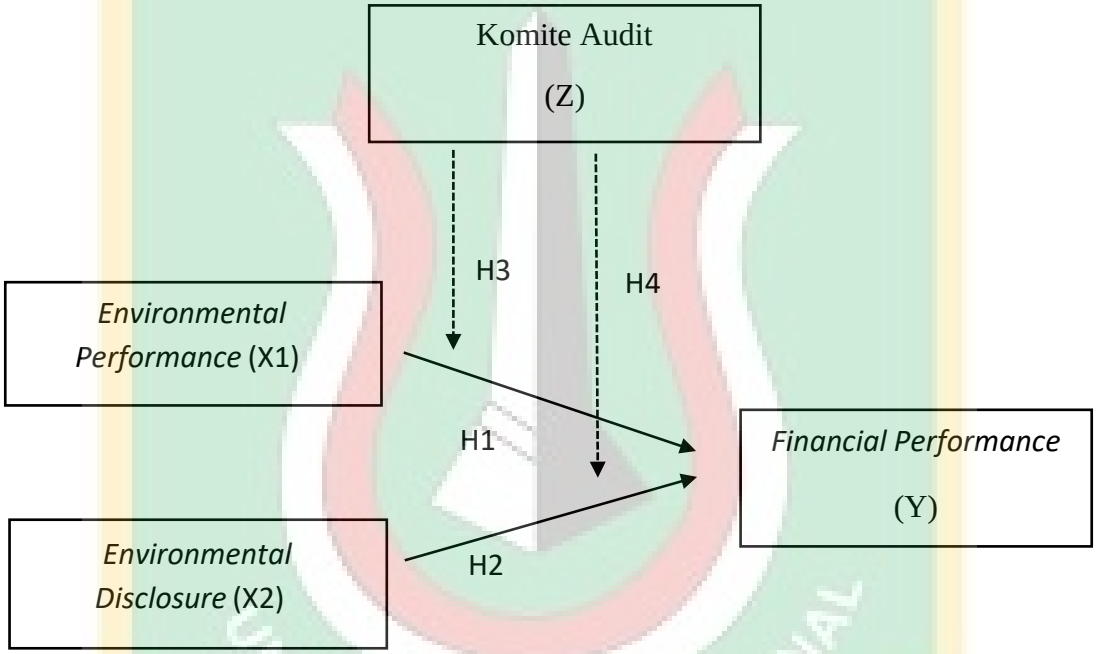

Keterangan :

→	: Garis Pengaruh
X1	: *Environmental Performance*
X2	: *Environmental Disclosure*
Y	: *Financial Perfromance*
Z	: Komite Audit (variabel moderasi)

E. Hipotesis

1. Pengaruh *Environmental Performance* terhadap *Financial Performance*

Fitiani (2013) dan Tunggal & Fachrurrozie (2014) membuktikan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, yaitu dengan adanya respon positif oleh investor melalui fluktuasi harga saham yang juga meningkatkan financial performance perusahaan. Selain itu konsumen atau masyarakat akan lebih tertarik untuk membeli barang atau jasa yang ditawarkan sebagai bentuk apresiasi terhadap perusahaan yang telah mengapresiasi kepeduliannya terhadap lingkungan. Sehingga hal ini berimbas pada pendapatan dan laba perusahaan yang merupakan indicator dari financial performance.

Namun, terdapat beberapa penelitian berbeda yang menyatakan bahwa environmental performance tidak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap financial performance. Rakhiemah & Agustia (2009) yang meneliti perusahaan manufaktur yang terdaftar d BEI menemukan dengan menggunakan regresi berganda dengan kinerja lingkungan sebagai variabel independen menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur tersebut yang tidak sesuai dengan prediksi teoritis. Dalam penelitian ini dibuktikan bahwa kinerja lingkungan bukan salah satu faktor yang menentukan fluktuasi harga saham dan besarnya dividen yang dibahikan pada satu periode.

Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu yang variatif, maka hipotesis pertama penelitian ini adalah:

H1 : *Environmental Performance* berpengaruh positif terhadap *Financial Performance*

2. Pengaruh *Environmental Disclosure* terhadap *Financial Performance*

Yanto & Muzzammil (2016) menyatakan bahwa perusahaan yang cukup lama beroperasi diasumsikan memiliki lebih banyak pengalaman dalam mengelola usahanya. Lamanya perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI diharapkan memiliki pendapatan yang lebih tinggi dan stabil. Namun, dengan lamanya aktivitas operasional ini, perusahaan juga mengalami berbagai macam masalah. Ketika kondisi keuangan perusanmmhaan buruk, mereka akan lebih luas dalam menginformasikan tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Tujuannya untuk

memberikan rasa aman kepada investor (Belkaoui & Karpik, 1989 dalam Yanto & Muzzammil, 2016).

Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu terkait*environmental disclosure* terhadap kinerja keuangan, maka hipotesis kedua penelitian ini adalah:

H2 : *Environmental Disclosure* berpengaruh positif terhadap *Financial Performance*

3. **Hubungan komite audit sebagai variabel moderasi antara *environmental performance* terhadap *financial performance***

Environemntal performance menunjukan kinerja lingkungan sebuah perusahaan , upaya tersebut dilakukan tentunya untuk menjaga lingkungan dan untuk menunjukan kepada masyarakat adanya peran perusahaan untuk menjaga alam sekitar. Dalam sebuha penelitian yang dilakukan oleh Fitiani (2013) dan Tunggal & Fachrurrozie (2014) membuktikan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan atau *financial performance* perusahaan. Dan dalam pembahasan ini ditambahkan komite audit sebagai pengukur adakah pengaruh yang diberikan komite audit terhadap *environmental performance* dan *financial performance*. Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Yunita Kurnia (2020) membuktikan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap *financial performance* perusahaan.

Oleh sebab itu peneliti ingin mengetahui lebih lanjut adakah pengaruh yang diberikan komite audit sebagai variabel moderasi terhadap *environmental performance* dan *financial performance.* Maka hipotesis ketiga dari penelitian ini adalah :

H3 : Komite Audit memperkuat hubungan antara variabel *Environmental Performance* terhadap *Financial Performance*

4. **Hubungan komite audit sebagai variabel moderasi antara *environmental disclosure* terhadap *financial performance***

Environmental disclosure atau pengungkapan ligkungan dapat dilakukan jika perusahaan melakukan kinerja lingkungan. Dalam hal ini komite audit berperan sebagai pengawas dibuatnya pelaporan atau pengungkapan lingkungan tersebut. Dalam jurnal yang dibuat oleh Laurentius Richard dan Hendra Wijaya (2022)

membuktikan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh terhdapa *financial performance*. Oleh karna itu peneliti ingin membuktikan lebih lanjut terkait komiteaudit jika diposisikan sebagai variabel moderasi apakah akan memperkuat hubungan antara environmental disclosure terhadap financial performance atau tidak. Maka hipotesis ke empat yang dibangun adalah :

H4 : Komite Audit memperkuat hubungan antara variabel *Environmental Disclosure* terhadap *Financial Performance*

UNIVERSITAS NASIONAL